

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Adrian Sutedi, 2011. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Anton Rosari, 2018, Pengaturan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Pesisir Pantai Propinsi Sumatera Barat dilaksanakan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 Jurnal, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

Cipto Handoyo Hestu, 1998, *Otonomi daerah dan Titik Berat Urusan Rumah Tangga Daerah*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

C.S.T. Kansil, 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Diana Halim Koencoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor  
Keshara de Silva, Prem W. Senarath Yapa, 2020, The Impact of Accountability Mechanisms on Public Sector Environmental Sustainability Performance: A Case Study of Sri Environmental Sustainability, The Australasian Accounting Business and Finance Journal Performance: A Case Study of Sri Lanka Lanka.

Domikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan memahami hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.

Haddin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan*, Genta Publishing, Yogyakarta,

Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta Sinar Grafika.  
Mengutip Philipus M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika

H.P Pannngabea, 2014, *Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Jakarta, PT Alumni

Irawan Soejito, 1983, *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah*, Jakarta: PT Bina Aksara,

Jum Anggriani. 2012. *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Juniarso Ridwan, Achmad sodik, 2013, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung: Nuansa.

Luffi Effendi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia malang.

- Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006
- Melia Rizki, 2020, *Pengawasan Terhadap Bangunan Rumah Di Daerah Sempadan Danau Maninjau Oleh Pemerintah Kabupaten Agam*, Jurnal: Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Moh.Kosnadi Saragih Bintan, 2008, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Mc Naughton dan Larry L. Wolf,1998, *Ekologi Umum, alih bahasa dari General Ecology*, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta,
- Nurcholis Hanif, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Philipus M. Hadjon (penyunting),1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Riduan Syahrani,1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Ridwan H.R , 2001, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta Ghalia Indonesia
- Ronny H Soemitro, 1982. *Metode penelitian hukum*, Penerbit Ghalia, Jakarta
- Sedarmayanti, 2004, *Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*, Mandar Maju, Bandung
- Suriansyah Murhaini, 2014, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Spelt.N.M. dan Ten Berge dalam Alvi Syahrin,2003, *Pengaturan Hukum dan , Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan*, Medan:Pustaka Bangsa Press
- Spelt, N.M dan J.B.J.M. ten Berge, 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hardjon, cet, I Surabaya, Yuridika
- W.M. Adams, 2009, *Green Development: environment and sustainability in a developing word*, Roulledge, New York
- Van Apeldoorn dalam Peter Mahmud Marzuki,2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

## **PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah.

Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan.

Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Presiden No 60 Tahun 2021 Tentang Danau Prioritas Nasional

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2011 Tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam tahun 2010 -2030.

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau.

Peraturan Bupati Agam No 24 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan.

## **SUMBER LAINNYA**

### **MAKALAH**

Aca Sugandhy,1987, *Perencanaan Tata Ruang Wilayah Berwawasan Lingkungan Sebagai Alat Keterpaduan Pembangunan*, Makalah Pada Komperensi PSL VII 1987 Di Sulawesi Selatan.

Ateng syafrudin, *Perizinan untuk kegiatan usaha*, Dalam Majalah Hukum, Media komunikasi UNPAS, Bandung, 1997,

Bagir Manan, 2000, *wewenang Propinsi, Kabupaten dan kota, dalam rangka otonomi daerah*, makalah pada seminar nasional, FH Unpad Bandung, 13 Mei 2000.

Bagir Manan. 1995, *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak dan Kemerdekaan Berkumpul di Tinjau dari Perspektif UUD 1945*, makalah, Jakarta

## INTERNET

Irsan, Tinjauan Yuridis izin Mendirikan Bangunan Dalam Penataan Ruang Di Kabupaten Jaya Pura, <http://digilib.unhas.ac.id>

Zumara W. Kutarga, Zulkifli Nasution, Robinson Tarigan, Sirojuzilam, *Kebijakan pegelolan Danau dan Waduk Ditinjau Dari Aspek Tata Ruang*, pada Website: [repository.usu.ac.id](http://repository.usu.ac.id)

Oman Sukmana, *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (welfare State)*, <http://ejournal.um.ac.id>

